



AUDIENSI UMUM MINGGUAN DI VATIKAN

Seorang anak laki-laki mendekati Paus Fransiskus selama audiensi umum mingguan di Vatikan, Rabu (20/10).

Pemerintah Malaysia Ancam Persulit Hidup Warga yang Menolak Divaksin

Tak main-main, otoritas Negeri Jiran mengancam akan membuat hidup mereka yang tidak divaksin menjadi sangat sulit.

KUALA LUMPUR (IM) - Pemerintah Malaysia menegaskan akan bersikap keras pada warganya yang menolak untuk menjalani vaksinasi Covid-19 tanpa alasan yang sah. Tak main-main, otoritas Negeri Jiran mengancam akan membuat hidup mereka yang tidak divaksin menjadi sangat sulit.

"Maaf untuk mengatakan, kami akan membuat hidup Anda sangat sulit, jika Anda tidak divaksinasi karena pilihan," kata Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin.

"Jika Anda memilih untuk tidak memvaksinasi, maka kami mungkin akan meminta Anda untuk melakukan tes rutin yang harus Anda bayar. Saya minta maaf karena saya harus tegas dalam masalah ini," lanjut Jamaluddin.

Ia juga memperingatkan bahwa aturan pemerintah akan mencakup pembatasan untuk makan di luar atau mengun-

gunji pusat perbelanjaan.

"Mandat vaksin akan diperluas di luar sektor pendidikan untuk mencakup seluruh sektor publik, di mana pegawai negeri juga perlu divaksinasi. Karyawan sektor swasta juga akan segera menghadapi aturan khusus," katanya.

Sebuah rencana di bawah Strategi Pengujian Nasional, yang akan diumumkan minggu depan, akan menjelaskan tindakan yang akan diambil Malaysia terhadap mereka yang tidak divaksinasi.

"Meskipun Malaysia tidak mungkin mengamankan vaksinasi di tingkat nasional, Malaysia secara serius melihat mandat sektoral," kata Jam-

aluddin.

Hingga kini, Malaysia telah mencatat total 2.390.687 kasus Covid-19 dan 27.921 kematian sejak awal pandemi. Menurut data hingga 17 Oktober, 69,7 persen populasi dewasa Malaysia telah divaksinasi lengkap. Sementara lebih dari 77 persen populasi telah menerima satu dosis.

"5.410 dosis booster telah diberikan kepada pekerja medis garis depan, dan warga lanjut usia akan segera mulai menerimanya. Pemerintah telah menjelaskan dan akan terus menekankan pada efektivitas vaksin," tuturnya.

Menurut Jamaluddin, mereka yang tidak dapat divaksi-

nasi bisa mendapatkan pengecualian dari aplikasi MySejahtera Kementerian Kesehatan. Pernyataan menteri kesehatan itu muncul hanya beberapa hari setelah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendesak warga Malaysia untuk mendapatkan suntikan vaksinasi Covid-19.

"Meskipun vaksinasi koronavirus tidak wajib di Malaysia, individu yang tidak divaksinasi akan kehilangan banyak hak istimewa, termasuk shalat di masjid, makan di luar dan pergi umrah karena Arab Saudi hanya mengizinkan individu yang divaksinasi untuk ziarah singkat ke Mekah," kata Yaakob. ● **tom**

Penculik Misionaris AS-Kanada di Haiti Minta Tebusan Rp14 M Per Orang

HAITI (IM) - Geng kriminal di Haiti yang menculik sekelompok misionaris asal Amerika Serikat (AS) dan Kanada meminta uang tebusan sebesar US\$ 1 juta (Rp 14 miliar) untuk masing-masing orang. Ini berarti penculik meminta uang tebusan total US\$ 17 juta (Rp 239 miliar) untuk seluruh misionaris yang diculik sejak akhir pekan lalu.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (20/10), Menteri Kehakiman Afghanistan, Liszt Quitel, menuturkan kepada

Reuters bahwa pembicaraan tengah berlangsung dengan para penculik untuk menagupayakan pembebasan 17 misionaris AS dan Kanada yang diculik oleh geng kriminal bernama 400 Mawozo itu.

Quitel mengonfirmasi besaran uang tebusan yang diminta penculik. Uang tebusan itu pertama dilaporkan oleh media terkemuka AS, Wall Street Journal (WSJ). "Mereka meminta US\$ 1 juta per orang," ucap Quitel kepada Reuters.

Media terkemuka AS lainnya, CNN, sebelumnya melaporkan

bahwa para penculik telah menghubungi Christian Aid Ministries, organisasi tempat korban berneung, pada Sabtu (16/10) lalu dan segera melontarkan besaran uang tebusan yang diminta untuk pembebasan mereka.

Dituturkan Quitel bahwa Kepolisian Haiti dan Biro Investigasi Federal AS (FBI) membantu organisasi itu dalam negosiasi dengan penculik. Sejak penculikan terjadi, menurut Quitel, beberapa kali percakapan telepon telah dilakukan antara penculik dengan organisasi tersebut.

Christian Aid Ministries

yang berbasis di Ohio, AS, ini menyerukan doa untuk 'otoritas sipil Haiti dan Amerika yang bekerja menyelesaikan situasi ini'.

Kelompok misionaris yang diculik itu terdiri atas 16 warga AS dan satu warga Kanada, dengan lima orang di antaranya masih anak-anak termasuk seorang bayi berusia 8 bulan. Mereka diculik di area bernama Croix-des-Bouquets yang berjarak 13 kilometer dari ibu kota Port-au-Prince, yang didominasi geng 400 Mawozo. Secara terpisah, Menteri

Luar Negeri AS, Antony Blinken, menuturkan kepada wartawan bahwa pemerintah AS 'fokus tanpa henti' pada penculikan dan terus berkomunikasi dengan Kepolisian Haiti dan organisasi misionaris itu.

"Sangat disayangkan, ini juga mengindikasikan seberapa besar persoalan dan bahwa itu merupakan situasi keamanan yang tidak berkelanjutan," sebutnya, merujuk pada geng kriminal yang menguasai sebagian Port-au-Prince. ● **ans**

Telibat Kasus Narkoba, Pengadilan Malaysia Hukum Gantung Wanita Tua

TAWAU (IM) - Seorang ibu tunggal dari sembilan anak dijatuhi hukuman mati di Pengadilan Tinggi Tawau, Malaysia pada Jumat (15/10) lalu, setelah dinyatakan bersalah memiliki dan mendistribusikan narkoba tiga tahun lalu. Dia ditangkap dengan 113,9 gram sabu pada Januari 2018.

Seperti dilaporkan Independent, hakim Pengadilan Tinggi, Alwi Abdul Wahab menjatuhkan hukuman gantung pada Hairun Jalmani (55), setelah jaksa berhasil menciptakan kasus prima facie, sementara pembela gagal untuk menimbulkan keraguan yang masuk akal.

Sebuah video Jalmani, yang bekerja sebagai penjual ikan, menangs tanpa henti setelah dia dijatuhi hukuman mati, menjadi viral di jejaring sosial di negara itu. Video berdurasi 45 detik itu memperlihatkan Jalmani yang diborgol sambil menangis saat dia dibawa pergi dari gedung pengadilan.

Dia juga memohon bantuan di luar ruang sidang sambil terisak-isak tak terkendali. Di bawah hukum Malaysia, mereka yang ditemukan memiliki lebih dari 50 gram sabu akan menghadapi hukuman mati wajib.

Para kritikus mengatakan bahwa hukuman keras itu sebagian besar ditanggung oleh kaum perempuan yang terpinggirkan di negara itu, terutama yang rentan. Mereka juga menunjukkan bahwa sebagian besar wanita terpidana mati di Malaysia telah dijatuhi hukuman di bawah undang-undang perdagangan narkoba

yang ketat yang "gagal mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi mereka yang rentan".

Menurut laporan Amnesty International, hingga Februari 2019, sebanyak 1.281 orang dilaporkan terpidana mati di Malaysia. Dari jumlah tersebut, 568 orang, atau 44 persen, adalah warga negara asing.

"Dari total 73 persen telah dihukum karena perdagangan narkoba, angka ini meningkat menjadi 95 persen dalam kasus perempuan," kata laporan itu.

"Beberapa etnis minoritas terwakili secara berlebihan di terpidana mati, sementara informasi yang tersedia terbatas menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka yang terpidana mati adalah orang-orang dengan latar belakang sosial ekonomi yang kurang beruntung," tambah laporan itu.

"Kasus Jalmani adalah contoh bagaimana hukuman mati Malaysia menghukum orang miskin (dengan) diskriminasi khusus terhadap perempuan," sebut pernyataan Amnesty International Malaysia.

Wakil Ketua Senior Yayasan Pencegahan Kejahatan Malaysia, Tan Sri Lee Lam Thye, mengatakan bahwa faktor sosial ekonomi, seperti kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja beberapa alasan penggunaan narkoba di kalangan nelayan.

"Banyak dari mereka hidup dalam kondisi kumuh, baik di rumah mereka yang bobrok maupun di perahu nelayan. Inilah salah satu faktor utama yang menyebabkan mereka mengonsumsi narkoba," ujarnya. ● **gul**

NATO Meradang Rusia Tangguhkan Misi Diplomatik

BRUSSELS (IM) - NATO menyesali keputusan Rusia untuk menangguhkan pekerjaan misi diplomatiknya dengan pakta pertahanan itu. Hal itu diungkapkan juru bicara NATO Oana Lungescu.

Pada Senin (18/10), Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengumumkan tindakan pembalasan Rusia terhadap pengusiran diplomatnya dari NATO. Selain menangguhkan pekerjaan misi penghubung militer NATO di Moskwa, biro informasinya juga ditutup. Misi permanen Rusia untuk NATO juga menangguhkan pekerjaan mulai 1 November atau beberapa saat kemudian. Untuk kontak dengan Rusia, aliansi bentukan Amerika Serikat (AS) itu sekarang harus menghubungi duta besar Rusia untuk Belgia.

"Kami telah mencatat keputusan Rusia untuk menangguhkan pekerjaan misi diplomatiknya ke NATO, dan Misi Penghubung Militer NATO di Moskwa, dan untuk menutup Misi Informasi NATO di Moskwa. Kami menyesali langkah-langkah ini," kata Lungescu seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (20/10).

Ia mengatakan dengan latar belakang keputusan misi Rusia, NATO menyatakan keterbukaannya untuk berdialog, termasuk melalui Dewan NATO-Rusia. "Kebijakan NATO terhadap Rusia tetap konsisten. Kami telah memperkuat pencegahan dan pertahanan kami dalam menanggapi tindakan agresif Rusia, sementara pada saat yang sama kami tetap terbuka untuk berdialog, termasuk melalui Dewan NATO-Rusia," ujarnya.

Sementara itu, Rusia telah mengungkapkan menyetujui langkah-langkah deeskalasi dengan NATO, termasuk penurunan

bersama aktivitas militer di sepanjang perbatasan Rusia dan negara-negara aliansi. Hal itu dikatakan oleh wakil utusan Rusia di PBB dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Andrey Belousov, pada pertemuan Komite Pertama Majelis Umum PBB.

"Hari ini langkah-langkah diperlukan untuk memperbaiki situasi, serta fokus pada pelaksanaan kesepakatan yang ada, termasuk Dokumen Wina," kata diplomat Rusia itu.

"Langkah-langkah transparansi sukarela tambahan berguna. Kami mengusulkan untuk menyetujui langkah-langkah deeskalasi bersama dalam aktivitas militer di sepanjang perbatasan antara Rusia dan negara-negara NATO, dan pada peningkatan mekanisme untuk mencegah insiden dan aktivitas militer yang berbahaya," tutur Belousov. ● **tom**



DELEGASI TALIBAN HADIRI PEMBICARAAN INTERNASIONAL DI RUSIA

Anggota delegasi Taliban tiba untuk menghadiri pembicaraan internasional tentang Afghanistan di Moskwa, Rusia, Rabu (20/10).

FBI Geledah Rumah Milik Miliarder Rusia

WASHINGTON (IM) - Agen-agen Biro Investigasi Federal (FBI) menggerebek rumah-rumah di Washington dan New York City pada Selasa (19/10). Properti tersebut masih terkait dengan miliarder Rusia Oleg Deripaska.

Sebanyak dua sumber yang akrab dengan penyelidikan mengatakan, Kantor Kejaksaan Amerika Serikat (AS) di Manhattan memimpin penyelidikan terkait raja industri logam yang memiliki hubungan dengan Kremlin itu. Di Washington, agen FBI menyegel dan menggeledah sebuah rumah besar di salah satu lingkungan terkaya AS itu. Terlihat petugas membawa kotak-kotak keluar dari rumah yang memiliki pita kuning "Crime Scene Do Not Enter" di bagian depan.

Juru bicara FBI mengkonfirmasi bahwa badan tersebut sedang melakukan kegiatan pengacak hukum resmi pengadilan di rumah tersebut. Juru bicara terpisah untuk kantor lapangan FBI di New York mengkonfirmasi kegiatan penegakan hukum di sebuah rumah di lingkungan Greenwich Village, New York, tetapi menolak berkomentar lebih lanjut.

Terdapat tiga kendaraan SUV FBI berkumpul di rumah dua lantai di New York. Para agen membawa kotak dan gulungan bungkus gelembung yang mereka masukkan ke dalam van putih. Petugas memblokir akses ke jalan dan

mencegah penduduk setempat memasukinya.

Perwakilan Deripaska mengatakan rumah-rumah yang digeledah milik kerabat oligarki Rusia. Keberadaan Deripaska masih belum bisa dipastikan.

AS memberlakukan sanksi terhadap Deripaska dan orang Rusia berpengaruh lainnya karena hubungannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Penyelidikan dilakukan setelah dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan 2016 yang dibantah Kremlin.

Deripaska pernah mempekerjakan Ketua Kampanye 2016 untuk Donald Trump, Paul Manafort. Dia dihukum pada 2018 atas tuduhan kriminal yang timbul dari penyelidikan atas dugaan campur tangan tetapi diampuni oleh presiden Trump pada Desember.

Departemen Keuangan AS mengatakan Deripaska dikenai sanksi karena bertindak atau mengaku bertindak untuk pemerintah Rusia. Dikatakan dia telah disidiki karena pencucian uang dan dituduh mengancam saingannya, penyadapan ilegal, pemerasan, dan penipuan.

Deripaska memiliki sebagian Rusa melalui sahamnya di perusahaan induk produsen aluminium raksasa En + Group. Washington sebelumnya menajutuhkannya terhadap kedua perusahaan tetapi tetap mempertahankannya milik Deripaska. ● **gul**

Kelab Malam di Irlandia Boleh Buka Setelah 18 Bulan Tutup

DUBLIN (IM) Pemerintah Irlandia akan mengizinkan kelab malam kembali dibuka setelah tutup selama 18 bulan. Irlandia menjadi salah satu negara dengan penguncian terlama di Eropa, yakni sejak Maret 2020.

Pengumuman itu dibuat oleh Kepala Pemerintahan Irlandia, Michael Martin, setelah pertemuan Kabinet untuk membahas pelonggaran pembatasan, Rabu (20/10).

"Jelas kami dapat membuka kembali sektor-sektor, tetapi dengan batasan tertentu," kata Martin, seperti dikutip dari thejournal.ie.

Secara keseluruhan, Martin menegaskan mulai Jumat (22/20), Sertifikat Digital Covid-19 akan tetap diperlukan untuk aktivitas di dalam ruangan. Ia juga menyarankan agar orang dengan gejala Covid-19 tetap di rumah.

"Pemerintah juga akan mendorong masyarakat yang

menghadiri acara untuk melakukan self test dengan tes anti gen," lanjutnya.

Panduan sektoral khusus akan dikembangkan untuk kelab malam yang menetapkan langkah-langkah perlindungan yang tepat. Ini akan melibatkan pass Covid-19, pengumpulan data pelacakan kontak dan pemakaian masker, kecuali saat makan, minum, dan menari.

Irlandia memiliki salah satu tingkat vaksinasi tertinggi di dunia, dengan 92 persen orang dewasa terlindungi sepenuhnya. Tetapi, Irlandia juga memiliki salah satu tingkat infeksi tertinggi di Eropa, dengan lebih dari 400 kasus per 100.000 orang dalam 14 hari terakhir.

Dengan pasien rawat inap yang terus meningkat, meskipun masih jauh di bawah puncak tahun ini dan tahun lalu, pemerintah juga menyetujui perpanjangan kampanye booster vaksin untuk semua orang berusia 60 tahun ke atas. ● **ans**



LOKASI SERANGAN BOM DI DAMASKUS - SURIAH

Pemandangan menunjukkan lokasi serangan bom pinggir jalan di pusat Damaskus, Suriah, dalam selebaran yang dirilis oleh SANA Rabu (20/10).

Ratusan Orang Tewas Akibat Banjir-Longsor di India dan Nepal

NEW DELHI (IM) - Lebih dari 100 orang meninggal dalam beberapa hari terakhir akibat banjir dan tanah longsor yang menerjang jalanan dan rumah-rumah di wilayah India dan Nepal. Puluhan orang lainnya dilaporkan masih hilang di kedua negara bertetangga itu.

Seperti dilansir AFP, Rabu (20/10), otoritas Uttarakhand, India bagian utara, menuturkan bahwa 46 orang tewas dalam beberapa hari terakhir, dengan 11 orang lainnya hilang. Sedangkan di Kerala, Kepala Menteri Pinarayi Vijayan, menyebut sedikitnya 39 orang tewas.

Sekitar 30 orang di antaranya di Uttarakhand tewas dalam tujuh insiden terpisah di kawasan Naitial, pada Selasa (19/10) waktu setempat, setelah hujan sangat lebat memicu longsor dan menghancurkan sejumlah bangunan.

Pejabat setempat, Pradeep Jain, menuturkan kepada AFP bahwa lima korban tewas di antaranya berasal dari satu keluarga yang rumahnya tertimbun longsor. Tanah longsor lainnya menerjang distrik Alomra dan menewaskan lima orang setelah bebaturan besar dan lumpur menghancurkan rumah mereka. Sementara di dua distrik terpencil di wilayah Himalaya, sedikitnya enam orang tewas pada Senin (18/10) waktu setempat.

Departemen Meteorologi India memperpanjang dan

memperluas peringatan cuaca buruk pada Selasa (19/10) waktu setempat, yang memprediksi hujan lebat masih akan mengguyur wilayah tersebut. Disebutkan bahwa beberapa area diguyur hujan dengan curah lebih dari 400 milimeter yang memicu banjir dan longsor.

Otoritas India memerintahkan penutupan sementara sekolah-sekolah dan melarang aktivitas keagamaan dan wisata di wilayah itu.

Sementara itu di Nepal, pejabat penanggulangan bencana setempat, Humkala Pandey menyebut puluhan orang meringgal dunia akibat banjir dan longsor. "Dalam tiga hari terakhir, ada 31 kematian akibat banjir dan tanah longsor yang dipicu hujan deras pasca-musim penghujan di berbagai wilayah negara ini. Sebanyak 43 orang hilang," sebut Pandey dalam pernyataannya.

"Hujan masih mengguyur di banyak tempat. Kami masih mengumpulkan data dari lapangan. Angka kematian masih bisa bertambah," imbuhnya.

Tanah longsor menjadi bahaya yang sering terjadi di kawasan Himalaya, namun para pakar menyebut bencana alam itu menjadi lebih sering terjadi saat hujan semakin tidak menentu dan gletser mencari. Para pakar juga menyalahkan konstruksi bendungan hidroelektrik dan deforestasi sebagai penyebab situasi terkini. ● **gul**